



INTISARI

Sistem pengukuran kinerja instansi sangatlah penting untuk menilai kinerja pemerintah sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. KPP Pratama Yogyakarta mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada publik berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Meskipun penerapan peraturan tersebut telah lama, namun laporan kinerja KPP Pratama Yogyakarta belum mengimplementasikannya secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan kinerja KPP Pratama Yogyakarta yang berbasis hasil. Analisis data menggunakan metode deskriptif (kualitatif) dengan desain *analitic spiral*. Teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen dan wawancara yang mendalam. Proses analisis data menggunakan metode pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dan model cetak biru kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengelola struktur dan proses laporan kinerja KPP Pratama Yogyakarta diperlukan sumber daya manusia sebagai subjek penyusunan dan pelaporan laporan kinerja dalam mendesain alur dan mekanisme laporan kinerja KPP Pratama Yogyakarta yang diidentifikasi dengan model logika standar dan penyusunan laporan kinerja tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014. Kemudian untuk memperoleh kualitas indikator kinerja yang tertuang dalam NKO dan NKP dilakukan pengukuran dengan model empat kuadran Friedman. Namun untuk mengukur kualitas indikator kinerja KPP Pratama Yogyakarta tidak memiliki alat ukur secara spesifik sehingga menggunakan model cetak biru kinerja dalam pengukurannya.

Kata kunci: KPP Pratama Yogyakarta, laporan kinerja, model cetak biru kinerja, PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.



ABSTRACT

Institutional performance measurement systems are very important to assess government performance as a manifestation of good governance. KPP Pratama Yogyakarta is responsible for its duties and functions to the public based on Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 7 of 1999 Concerning the Performance Accountability System of Government Agencies. Although the application of the regulation has been a long time, but the KPP Pratama Yogyakarta performance report has not been implemented optimally. This study aims to analyze the Yogyakarta KPP Pratama performance report based on results. Data analysis uses descriptive (qualitative) method with a spiral analytic design. Data collection techniques through document analysis and in-depth interviews. The data analysis process uses the guideline method of the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of RI No. 53 2014 and the performance blueprint model. The results of this study indicate that managing the structure and process of KPP Pratama Yogyakarta performance reports required human resources as the subject of the preparation and reporting of performance reports in designing the flow and mechanism of KPP Pratama Yogyakarta performance reports that are identified by standard logic models and the preparation of performance reports in accordance with regulations The Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 53 of 2014. Then to obtain the quality of the performance indicators contained in the NKO and NKP, measurements were taken with the Friedman four quadrant model. However, to measure the quality of KPP Pratama Yogyakarta performance indicators do not have specific measurement tools so use the performance blueprint model in its measurement.

Keywords: KPP Pratama Yogyakarta, performance reports, performance blueprint model, PERMENPAN dan RB Number 53 of 2014.